

PENGARUH INTEGRITAS DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI- SELATAN

Nur Fatma Basar *)

Abstract : *Integrity and Competence Auditor influence on the Quality Examination in South Sulawesi Provincial Inspectorate. This study aimed to analyze the effect of integrity and competence of the auditors on the quality of the examination results on the inspectorate South Sulawesi, and to analyze which variables are dominant. Gathering data using questionnaires distributed to 93 respondents, while questionnaire to restore as much as 73. Of these respondents, there are 42 people or 57.53% aged over 40 years, while the remaining <40 years. Male respondents as many as 48 people or 65.75% and women by 25 people or 34.25%. Working period 1-10 years as many as 33 people or 45.21%, and 55.79% above 10-year tenure. Group III as many as 53 people (72.60%) while the rest of class I, II, and IV. S1 education level as many as 45 people, or approximately 61.64%, while the remainder had high school education, Diploma, and Magister. Training of the most widely followed as much as two times the number of 24 people (32.88%). The results showed that either simultaneously or in partial, Integrity and Competence positive and significant impact on the quality of the results of the Inspectorate of South Sulawesi province. Thus, the first hypothesis is proven research. Of two independent variables used in the quality of the examination, competency variables that have a dominant influence on the quality of the examination results in the Inspectorate of South Sulawesi province. Thus, the second hypothesis of this study is proven.*

Keywords: *Integrity and Competence and Quality Examination Results*

PENDAHULUAN

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui

kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan

untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit, kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit.

Kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Alim *dkk.* (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang

mereka audit (Arens *dkk.*, 2004). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Budi *dkk.* (2004) dan Oktavia (2006) tentang pengalaman kerja memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor, sementara dari penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik. Begitu juga penelitian yang dilakukan Asih (2006), menemukan bahwa pengalaman auditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. Herliansyah *dkk.* (2006), dari penelitiannya menemukan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap *judgment* auditor. Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bersumber dari penelitian Christiawan (2002) dan Alim *dkk.* (2007). Hal yang sama dilakukan oleh Mardiasar *dkk.* (2007), yang memberikan hasil penelitian bahwa pekerjaan dengan kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Kemudian Trisnaningih (2007) menyatakan bahwa pemahaman *good governance* dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh

buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001) Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah provinsi adalah inspektorat provinsi. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah dan provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan provinsi dan tugas lain yang diberikan kepala daerah dan provinsi, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektifitas organisasi (Halim Abdul, 2008). Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (2008) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKPP) Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007, menyatakan laporan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan disclaimer. Berdasarkan hasil pemeriksaan penggunaan anggaran pada 52 satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja, BPK tidak memberikan pendapat dalam hasil audit tersebut. Hasil audit menunjukkan, laporan keuangan Pemerintah Sulawesi Selatan masih memerlukan perbaikan. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah, BPK menerbitkan tiga rekomendasi. Untuk laporan keuangan terbaik mendapatkan rekomendasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Satu tingkatan dibawahnya yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan disclaimer

atau tidak memberikan pendapat untuk laporan keuangan yang buruk.

Selama ini, banyak aset pemerintah Provinsi baik berupa tanah maupun bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Akibatnya, aset tersebut rawan diserobot oleh pihak lain. Kelemahan lain yang ditemukan BPK yakni pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel dinilai lemah. Terutama secara administratif sebab banyak anggaran yang tidak dilengkapi dengan nota pertanggungjawaban. Dari hasil pemeriksaannya, belum ada indikasi kerugian negara. Hanya saja, penyajian data dari SKPD yang belum klop dengan data yang dimiliki provinsi. Pernyataan tersebut tidak dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum. (Abdul Halim, 2008:77). Kemudian menurut Mulyadi (2010:22) bahwa jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditee, maka laporan audit tersebut disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah, pertama: pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Kedua: auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Berkaitan dengan itu maka kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat pemerintah provinsi Sulawesi selatan saat ini masih perlu dibenahi. Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik

tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas hasil audit masih menjadi perdebatan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001), bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit juga dikemukakan oleh Pramono (2003). Dikatakan bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat *quality assurance* apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain: *standar for the professional practice, internal audit charter*, kode etik internal audit, kebijakan, tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja audit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah integritas dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi- Selatan?
2. Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi- Selatan.
2. Untuk menganalisis variabel manakah yang lebih dominan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi -Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Sunarto (2003) dalam Sukriah (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Jadi dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan sikap konsistensi dan berperilaku serta bertindak dengan baik dan berpegang teguh terhadap suatu pekerjaan atau tanggungjawab dengan tidak berpaling pada prinsip kecurangan.

Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar menurut I Gusti Agung Rai (2008). Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium menurut Suraida (2005). Sedangkan istilah kompetensi menurut Sukrisno Agoes, dkk (2011:146) mengemukakan, bahwa kompetensi tersebut memiliki definisi yang berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dalam kualitas hasil

yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan/profesinya. Bila pengertian kompetensi mencapai tiga unsur yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, maka orang yang kompeten sama artinya dengan orang yang profesional. Namun sering kali konsep *kompetensi* dimaksudkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu hanya dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan saja, tanpa mempertimbangkan sikap dan perilaku.

Sehubungan dengan itu, menurut I Gusti Agung Rai (2010:63), bahwa kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang auditor kinerja yaitu mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mutu personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
- b. Berpikiran luas (*broad-minded*)
- c. Mampu menangani ketidakpastian
- d. Mampu menerima bahwa ada solusi yang mudah
- e. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif dan
- f. Mampu bekerja sama dalam tim.

Disamping itu, auditor juga harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Buttery, Hurford, dan Simpson (I Gusti Agung Rai :64) menyebutkan, bahwa terdapat beberapa mutu profesional lainnya harus dimiliki oleh seorang auditor, seperti kepandaian (*inteligensi*), kemampuan komunikasi, perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, serta kemampuan imajinasi yang

baik untuk menciptakan sikap yang kreatif dan penuh inovasi.

2. Pengetahuan umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan *review* analitis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Pengetahuan akuntansi mungkin akan membantu dalam mengolah angka dan data.

3. Keahlian khusus

Keahlian yang harus dimiliki oleh auditor *antara* lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil (De Angelo, 1981, dalam Alim *dkk.*, 2007).

Hubungan Integritas dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan integritas dengan kualitas hasil pemeriksaan dapat

dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Hubungan Kompetensi dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Alim *dkk* (2007) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Christiawan (2002) dan Alim *dkk.* (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor terhadap pemeriksaan, maka semakin meningkat atau baik dan semakin berkualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kerangka Konseptual

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Menjadi landasan untuk memahami dan mengkaji faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat provinsi dalam pengawasan keuangan provinsi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: **pertama**,

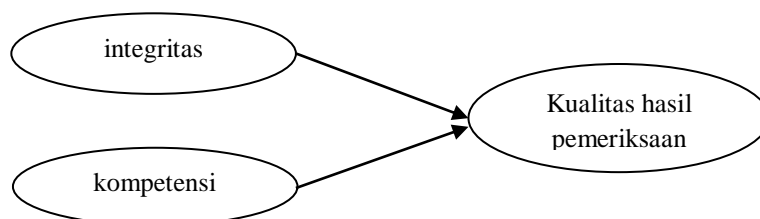
perencanaan program pengawasan; **kedua**, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan **ketiga**, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam kualitas hasil audit di lingkungan Inspektorat khususnya Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan Keuangan daerah dan provinsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya integritas serta kompetensi. Faktor integritas mengharuskan seseorang harus bersikap jujur, transparansi, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, sebab untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Sedangkan Faktor Kompetensi auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah yang rendah sulit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebab setiap Auditor internal dituntut memiliki tanggung

jawab terhadap pengendalian intern bagi perusahaan atau organisasi demi tercapainya efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang di ambil oleh perusahaan/organisasi.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan dari hasil pemeriksaan auditor.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan kerangka konseptual yang dimaksudkan untuk menjadi penuntun alur pikir dan landasan untuk menyusun hipotesis.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan telaah teoritis, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Integritas, dan Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Kompetensi auditor yang dominan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan.

maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (x) dengan variabel dependen (Y) yang menggunakan rumus statistik. Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh dan akurat serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan analisa kuantitatif dan deskriptif, dengan

ini adalah selama dua bulan yaitu Oktober-November 2012.

Jenis-jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Termasuk dalam klasifikasi dan kualitatif data yang berskala ukur nominal dan ordinal misalnya pengalaman kerja (bagus, jelek, sedang).

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Termasuk dalam klasifikasi data kuantitatif adalah data yang berskala ukur interval dan rasio.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara maupun dari hasil angket yang diberikan kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan dengan topik penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data dari berbagai sumber literatur, dokumentasi atau informasi dari pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara operasional yang ditempuh pada saat pengumpulan data berdasarkan data yang diperlukan, ditempuh cara-cara operasional sebagai berikut :

1. Metode kuesioner (daftar pertanyaan), yaitu suatu daftar yang dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Artinya jawaban angket tersebut telah disediakan. Sehingga responden hanya memilih jawaban

yang dianggap paling benar pada setiap pertanyaan (item) dalam angket tersebut yang meliputi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili indikator-indikator yang diteliti.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 93 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel anggota populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan tujuan penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data untuk menguji kebenaran hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sebagai berikut :

Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada

analisis statistik parametrik. Asumsi yang harus dimiliki oleh data bahwa data tersebut berdistribusi secara normal, yaitu data akan mengikuti bentuk distribusi normal dan memusat pada nilai rata-rata dan median.

1. Uji Multikolinieritas, Uji Multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus bebas dari gejala multikolinieritas. Gejala multikolinieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Apabila terjadi gejala multikolinieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik.
2. Uji Heterokedastisitas, Uji heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varian dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu.
3. Metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan distribusi pendapat responden terhadap Integritas dan Kompetensi auditor terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Metode analisis kuantitatif, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan digunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis) dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Kualitas hasil pemeriksaan
 b₀ = Nilai intersep (konstanta)
 b₁-b₅ = Koefisien arah regresi
 X₁ = Integritas Auditor
 X₂ = Kompetensi Auditor
 e = Kesalahan estimasi (*error*)

Defenisi Operasional dan Pengukurannya

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan maka variabel yang dianalisis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Integritas (X₁) merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Indikator dari Integritas adalah Kejujuran auditor, Keberanian auditor, Sikap bijaksana auditor, dan Tanggung jawab auditor. Sedangkan alat ukur yang digunakan adalah menggunakan skala likert dengan 5 skala nilai yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, serta Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5
2. Kompetensi (X₂) adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus. Indikator dari Kompetensi adalah meliputi Mutu personal, Pengetahuan umum, dan Keahlian khusus. Sedangkan alat ukur yang digunakan adalah menggunakan skala likert dengan 5 skala nilai yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, serta Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.
3. Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y) adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan Kualitas Hasil Pemeriksaan adalah Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit dan Kualitas laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan alat ukur yang digunakan adalah menggunakan skala likert dengan 5 skala nilai yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S)

dengan nilai 4, serta Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarkan melalui *contact person* kepada aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan September 2012 sampai dengan November 2012, kuisisioner yang disebarkan sebanyak 93 sedangkan koesioner yang dikembalikan sebanyak 73.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjaring data yang variatif, khususnya data identitas responden yang meliputi: tingkat umur, jenis kelamin, masa kerja, tingkat golongan/pangkat, tingkat pendidikan, dan pelatihan. Adapun penyebaran responden berdasarkan karakteristik responden disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Umur

Tingkat umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja auditor. Semakin matang umur seseorang maka semakin baik pula pemahamannya terutama dalam menilai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Data yang terjaring menunjukkan bahwa umur diatas 40 tahun merupakan responden terbanyak yakni sebanyak 42 orang atau 57,53 %, kemudian diikuti umur antara 31-35 tahun sebanyak 14 orang atau 19,18 %, dan tingkat umur 36-40 tahun sebanyak 11 orang atau 15,07 %, sedangkan responden paling sedikit adalah tingkat umur 26-30 tahun yaitu 6 orang atau 8,22 %. Hal ini berarti responden pada umumnya memiliki pemahaman yang baik serta tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya.

2. Jenis Kelamin

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 73 orang, dengan jenis kelamin terdiri atas laki-laki dan perempuan. Adapun karakteristik responden menurut jenis kelamin adalah wanita sebanyak 25 orang (34,25%), sedangkan pria lebih banyak yaitu sebanyak 48 orang (65,75%). Hal ini berarti auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya pria.

3. Tingkat Masa kerja

Tingkat masa kerja seorang auditor sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tanggung jawabnya. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja diketahui bahwa masa kerja 1-10 tahun sebanyak 33 orang atau 45,21 %, kemudian masa kerja 11-20 tahun sebanyak 18 orang atau 24,66 % dan yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun sebanyak 22 orang 30,13%.

4. Tingkat Golongan/pangkat

Tabel dibawah ini menunjukkan karakteristik responden menurut golongan atau pangkat pada inspektorat provinsi Sulawesi selatan. dapat dijelaskan karakteristik responden pada inspektorat provinsi Sulawesi selatan menurut tingkat golongan/pangkat dimana golongan II sebanyak 1 orang (1,37%), dangolongan III yaitu sebanyak 53 orang (72,60%). Hal ini berarti auditor inspektorat provinsi Sulawesi selatan pada umumnya berpangkat golongan III. Sedangkan pada golongan IV auditor sebanyak 19 orang (26,03%).

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang telah ditamati oleh responden sesuai dengan latar belakang pendidikan dan transparansi ilmu yang ditekuninya dan diakui oleh pemerintah.

Data yang terjaring menunjukkan bahwa tingkat S1 merupakan responden terbanyak yakni sebanyak 45 orang atau sekitar 61,64%, kemudian disusul oleh tingkat pendidikan S2 sebanyak 22

orang atau sekitar 30,14%, dan Diploma sebanyak 4 orang atau sekitar 5,48%. Sedangkan tingkat SLTA sebanyak 2 orang atau sekitar 2,74%. Hal ini berarti responden memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor karena ditunjang oleh tingkat pendidikan memadai.

6. Tingkat pelatihan

Semakin sering seseorang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maka semakin baik pula pemahamannya terutama dalam menilai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. karakteristik responden pada inspektorat provinsi Sulawesi selatan menurut tingkat pelatihan yang diikuti dimana pelatihan yang paling banyak diikuti sebanyak 2 kali dengan jumlah 24 orang (32,88%), kemudian pelatihan sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 18 orang (24,66%). Selanjutnya pelatihan sebanyak 3 kali dengan jumlah 16 orang (21,91), pelatihan sebanyak 5 kali diikuti oleh 6 orang (8,22%) dan pelatihan sebanyak 4 kali dengan jumlah 5 orang (6,85%) bahkan masih ada yang belum mengikuti pelatihan sama sekali yakni sebanyak 4 orang (5,48%).

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jumlah sampel atau responden sebanyak 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan November tahun 2012 dan diperoleh data sesuai dengan variabel yang akan dianalisis dengan menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat.

Hasil tabulasi data untuk ketiga variabel penelitian ini, secara deskriptif dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Variabel Integritas (X1)

Integritas merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Berdasarkan hasil penelitian

melalui kuesioner yang telah diproses melalui tabulasi data menunjukkan bahwa integritas auditor memiliki variasi yang berbeda-beda. Melalui hasil tabulasi data lapangan dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditunjukkan secara deskriptif menunjukkan bahwa 27 orang (36,99%) menyatakan integritas auditor sangat sesuai dalam mendukung tugasnya, 36 orang (49,32%) sesuai, 6 orang (8,22%) cukup sesuai, 2 orang (2,74%) tidak sesuai, dan 2 orang (2,74%) menyatakan sangat tidak sesuai dalam mendukung tugasnya.

b. Variabel Kompetensi (X2)

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus. Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang telah diproses melalui tabulasi data menunjukkan bahwa kompetensi auditor memiliki variasi yang berbeda-beda. Melalui hasil tabulasi data lapangan dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditunjukkan secara deskriptif bahwa 27 orang (36,99%) menyatakan kompetensi auditor sangat sesuai dalam mendukung tugasnya, 34 orang (46,58%) sesuai, 8 orang (10,96%) cukup sesuai, 1 orang (1,37%) tidak sesuai, dan 3 orang (4,11%) menyatakan sangat tidak sesuai dalam mendukung tugasnya.

c. Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y)

Kualitas Hasil Pemeriksaan adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian melalui

kuesioner yang telah diproses melalui tabulasi data menunjukkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan memiliki variasi yang berbeda-beda. Melalui hasil tabulasi data lapangan dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditunjukkan secara deskriptif bahwa 30 orang (41,10%) menyatakan kualitas hasil pemeriksaannya sangat sesuai, 34 orang (46,58%) sesuai, 5 orang (6,85%) cukup sesuai, 3 orang (4,11%) tidak sesuai, dan 1 orang (1,37%) menyatakan sangat tidak sesuai.

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner atau instrument penelitian dimaksudkan untuk menguji kelayakan secara psikometri suatu kuesioner. Kuesioner yang valid dan reliabel akan menjamin data yang diperoleh tidak mengalami bias yang berarti. Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing item pernyataan dalam kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi *product moment* antara skor item dengan skor total (skor instrument). Jika suatu item memiliki korelasi item-total signifikan ($r_{yx} > r_{tabel}$), maka item pernyataan tersebut valid. Dalam uji validitas ini digunakan responden sebanyak 73 orang, sehingga pada tingkat signifikansi 5% dari Tabel r diperoleh nilai $r_{tabel} = 0,231$.

Uji reliabilitas terhadap kuesioner penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach. Menurut Malhotra (1996) "Suatu instrumen dikatakan handal apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6", maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner ini memiliki koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach sebesar 0,992. Oleh karena nilai tersebut lebih besar dari 0,6, maka disimpulkan bahwa kuesioner

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Kesimpulan dari hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel-variabel penelitian adalah kuesioner ini secara psikometrik layak digunakan sebagai alat/instrumen pengumpul data.

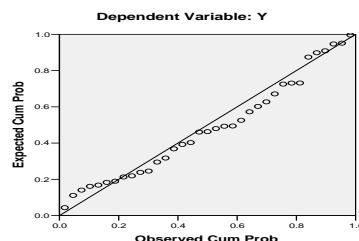
Uji Asumsi Klasik (Uji Persyaratan Analisis)

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penggunaan analisis regresi linier berganda memerlukan asumsi yang harus dipenuhi, yaitu (1) data yang diperoleh dari sampel yang digunakan dalam penelitian harus berdistribusi normal, (2) independensi variabel, yakni tidak adanya saling ketergantungan pada masing-masing variabel penelitian (saling bebas), dan (3) varian dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sesuai dengan asumsi tersebut maka uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas harus dilakukan terlebih dahulu.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan sebagai persyaratan dalam penggunaan statistik parametrik, sekaligus untuk mengetahui data yang terkumpul dari responden berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bisa dilihat dalam sebaran data pada grafik *normality probability plot*, dimana sebaran data yang berada disekitar garis diagonal dianggap berdistribusi normal. Berikut adalah grafik normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan mengacu pada pandangan Ghozali (2006: 59) yang menyatakan bahwa gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance*

inflation factor (VIF). Suatu variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* lebih kecil dari 10 dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil perhitungan uji multikolinieritas terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Rangkuman hasil uji multikolinieritas

| No. | Variabel | Tolerance | VIF | Kesimpulan |
|-----|----------|-----------|-------|---------------------------------|
| 1 | X1 | 0,953 | 1,119 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| 2 | X2 | 0,982 | 1,129 | Tidak terjadi multikolinieritas |

Sumber: data primer diolah, 2012

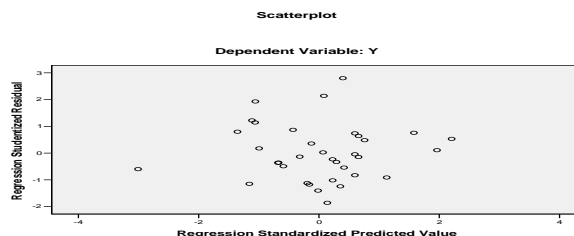
Dari tabel rangkuman hasil uji multikolinieritas di atas, terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara kelima variabel bebas.

3. Uji Heterokedastisitas.

Uji heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varian dari residual tidak sama untuk satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual.

Hasil uji heterokedastisitas dengan program SPSS 17 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar di atas, terlihat sebaran titik-titik yang acak baik di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, dan dapat disimpulkan tidak terjadi *heterokedastisitas* dalam model regresi.

Analisis Pengujian Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui apakah kedua variabel yaitu integritas, dan kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

maka digunakan model analisis statistik yaitu regresi linier berganda dengan bantuan program statistik SPSS 17. Penelitian ini telah memenuhi syarat untuk menggunakan pengujian regresi berganda karena telah dilakukan uji validitas dan asumsi klasik, sehingga analisis selanjutnya dapat digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan maka digunakan

analisis regresi linier berganda, dimana variabel bebasnya adalah, integritas (X1), dan kompetensi (X2), sedangkan variabel terikatnya

adalah kualitas hasil pemeriksaan (Y). Berikut hasil uji regresi yang dilakukan.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi (B) | T hitung | Nilai P | Keterangan |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|------------|
| Integritas (X1) | 0,170 | 2,216 | 0,030 | Signifikan |
| Kompetensi (X2) | 0,318 | 4,006 | 0,000 | Signifikan |

Konstanta = 0,128
 F hitung = 336,440, P = 0,000
 F Tabel = 2,352, t tabel = 1,996
 R = 0,981, R² = 0,962

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang dilakukan, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,128 + 0,170X1 + 0,318X2$$

Dari persamaan yang terbentuk di atas dapat dijelaskan interpretasinya sebagai berikut:

1. b_0 (konstanta) = 0,128 artinya apabila variabel integritas, dan kompetensi auditor dalam keadaan konstan, maka kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,128 satuan.
2. $B_1 = 0,170$ merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel integritas auditor, ternyata dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sebesar 0,170 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti kompetensi auditor berada dalam keadaan konstan.
3. $b_2 = 0,318$ merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor, ternyata dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sebesar 0,318 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti integritas auditor berada dalam keadaan konstan.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan secara simultan (bersama-sama). Uji F

dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung > F tabel, maka dikatakan pengaruhnya signifikan, dan apabila F hitung < F tabel, maka dikatakan pengaruhnya tidak signifikan. Dari tabel di atas diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, yakni 336,440 > 2,352. Jadi, variabel integritas, dan kompetensi auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan secara simultan.

Uji T (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan secara parsial (sendiri-sendiri). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka dikatakan pengaruhnya signifikan, dan apabila t hitung < t tabel, maka dikatakan pengaruhnya tidak signifikan.

t hitung untuk variabel integritas (X1) lebih besar dari t tabel, yakni 2,216 > 1,996. Jadi, variabel integritas (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan (Y) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan secara parsial.

t hitung untuk variabel kompetensi (X2) lebih besar dari t tabel, yakni 4,006 > 1,996. Jadi, variabel kompetensi (X2)

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan (Y) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan secara parsial.

Dari hasil uji t tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah variabel kompetensi (X2) dengan nilai t hitung terbesar (4,006) dan nilai signifikansi terkecil (0,000).

Uji Korelasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel integritas, dan kompetensi auditor dengan kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan maka dilakukan uji korelasi. Dari hasil uji korelasi yang dilakukan didapat nilai korelasi (R) sebesar 0,981 yang signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara variabel integritas, dan kompetensi auditor dengan kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,962 (96,2%). Ini berarti bahwa variasi terikat kualitas hasil pemeriksaan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel integritas (X1), dan kompetensi (X2) sebesar 96,2%, sedangkan sisanya 3,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini dengan menggunakan dua variabel bebas yaitu integritas (X1), dan kompetensi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dari kelima variabel independent tersebut, variabel kompetensi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

| Kode | Hipotesis | Hasil |
|------|---|----------|
| H1 | Integritas, dan Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan | Diterima |
| H2 | Kompetensi auditor yang dominan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan | Diterima |

Sumber: Data primer diolah, 2012

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Sedang untuk membahas pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka berikut ini akan diuraikan satu persatu:

1. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Nilai signifikansi untuk variabel integritas sebesar $2,216 > 1,996$ dengan

koefisien regresi 0,170. Hal ini berarti hipotesis pertama dapat diterima bahwa integritas berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan sikap konsistensi dan berperilaku serta bertindak dengan baik dan berpegang teguh terhadap suatu pekerjaan atau tanggungjawab dengan tidak berpaling pada prinsip kecurangan merupakan sikap integritas.

2. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,318. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung 4,006 > t tabel 1,996. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika auditor tidak memiliki kompetensi yang cukup atau rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Integritas, dan kompetensi auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial variabel Integritas, dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian terbukti.

Dari kedua variabel bebas yang digunakan dalam kualitas hasil pemeriksaan, ternyata variabel kompetensi yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini terbukti.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini penentu kebijakan perlu terus menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan Integritas, dan kompetensi auditor melalui pemberian pelatihan-pelatihan serta kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.

Karena kompetensi yang paling dominan pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan, maka disarankan kebijakan yang terkait dengan kompetensi auditor dapat dipertahankan terutama pada indikator yang membentuknya, namun indikator yang relatif rendah dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusriyanto Toro. 2006. Tingkat Materialitas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Anonim, Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesi Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Anonim, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Anonim, Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- Anonim, Permenpan Nomor PER/05/MPAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. yang Ekonomis, Efisien & Efektif dalam Rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogyakarta.
- Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu*. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- DeAngelo,L.E, (2001), Auditor Size and audit quality. *Journal of Accounting & Economics*
- Dukat Edwan. 2006. *Auditing 1*. AK Group. Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim Abdul. 2008. *Auditing 1 : Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Loehoer, Robert dan John H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo.2005.*Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
- _____.2000. *Value For Money Audit Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Akuntabilitas Publik*. Bahan Seminar Strategi Pemeriksaan Keuangan Daerah
- Pramono, E. S. 2003.*Transformasi Peran Internal Auditor dan Pengaruhnya bagi Organisasi*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 3 No.2 Agustus
- Anonim, Pusdiklatwas BPKP. 2005. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Keempat.
- Rai I Gusti A. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2010.*Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kedua belas. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukrisno A., I Cenik Ardana.2011. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta
- Sunarto. 2003. *Auditing*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Penerbit Panduan. Yogyakarta.
- Tampubolon Robert. 2005. *Risk and Systems - Based Internal Audit*.Cetakan pertama. Penerbit PT. Alex Komputindo. Jakarta.
- *) Penulis adalah Dosen Tetap STIE Tridharma Nusantara Makassar.**